

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung
- Atmosudirjo, Prayudi.. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983
- Asshiddiqie , Jimly .*Konstitusi, Konstitualisme Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press. 2006
- B. Arief Sidharta (Penerjemah). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Aditama. 2009
- Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Salah Suatu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni .1991
- Hardjosoemantri, Koesnadi. “*Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*” *Bahan Penataran Nasional Hukum Lingkungan*, (Eks) Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Surabaya: FH Universitas Airlangga, 9-14 Januari 1995
- HR, Ridwan. 2011.*Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Press
- Koesrijanti, Atik, Soeryo Adiwibowo dan Triarko Nurlambang. 2008. *Arah Kebijakan Lingkungan Strategis di Indonesia*. Environmental Sector Program (ESP) 1 Indonesia State Ministry of the Environment and DANIDA
- Kusumaatmaja, Mochtar. Agustus 1972. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pemikiran dan Saran*. Padjadjaran. Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Jilid IV. Nomor 1
- L. Woltgens & Th. G. Drupssten. 1992. *Hukum Perizinan Lingkungan, Bahan Penataran Hukum Lingkungan, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair
- Manan, Bagir. “*Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*”. Makalah Penataran Dosen Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum BKS-PTN Bidang Hukum Sewilayah Barat, Fakultas Hukum Universitas Lampung. 1994.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. 2008
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yusticia, Sleman, 2010.
- Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. 2001
- Pusat Bahasa Depdikbud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pudyatmoko, Y. Sri.. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta : Grasindo. 2009
- Salim HS. S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2007
- Subekti, Muhammad. 2010. *Strategi Menghadapi Krisis Energi Nasional*. Artikel. Jakarta

Peraturan perundang-undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang perlindungan lingkungan hidup

Undang- Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;

Peraturan pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 tentang perimbangan keuangan Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2007 tentang kegiatan Usaha Panas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2008 tentang tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Permen ESDM nomor 005/2007 dan Permen ESDM No. 2 Tahun 2009 mengenai penugasan Survei Pendahuluan oleh Menteri kepada badan usaha yang dilaksanakan atas biaya dan resiko sendiri.

Permen ESDM No. 05 Tahun 2009 mengenai Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari Koperasi atau badan usaha lain.

Permen ESDM nomor 11 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Permen ESDM No.14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari PLTP.

Permen ESDM No. 269-12/26/600.3/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik tahun 2008 yang disediakan oleh PT PLN.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0211 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2478 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suoh - Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Website :

1. <http://m.aktual.co/energi/154604kemenhut-lelet-keluarkan-izin-dpr-akan-revisi-uu-panas-bumi> oleh Vicky Anggriawan 1 Apr 2013 pukul 16:09:33 di unduh tanggal 2 april 2013 pukul 05:48
2. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/13/03/19/mjwcqf-menhut-pastikan-tak-persulit-izin-eksplorasi-panas-bumi> **Reporter** : Muhammad Iqbal **Redaktur** : Nidia Zuraya di unduh tanggal 3 april 2013 jam 06:36
3. <http://economy.okezone.com/read/2013/03/18/19/777303/pembangunan-pembangkit-panas-bumi-di-lampung-tunggu-izin-kemenhut> di unduh pada tanggal 3 april 2013 jam 06:41
4. <http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral/sejarah.html> . diakses 16 april 2013. Pukul 8.37 wib
5. <http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral/sejarah.html>